BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korea Utara adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Semenanjung Korea. Sebelum tahun 1945 Korea merupakan bagian dari kesatuan Semenanjung Korea sebelum akhirnya mengalami perpecahan. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi dua bagian wilayah dimana Uni Soviet menduduki wilayah Utara sementara Amerika Serikat menduduki wilayah Selatan (Hyug-Baeg Im, Bae-HO Hahn, Chan Lee, Young Ick Lew, Wong-ik Yu, 2019).

Pembagian wilayah Semenanjung Korea secara garis besar disebabkan oleh intervensi dua kekuatan blok besar. Wilayah utara diduduki oleh kekuatan komunis Uni Soviet dan wilayah Selatan oleh liberalis Amerika. Oleh karena pendudukan tersebut tak jarang masyarakat semenanjung pada saat itu melakukan perpindahan lintas batas atau disebut juga dengan *border-crossing* dari utara ke selatan maupun selatan ke utara. Perpindahan yang dilakukan karena sebagian masyarakat yang tidak mendukung ideologi komunis Uni Soviet ataupun sebaliknya.

Fenomena penyeberangan batas negara atau *border-crossing* oleh masyarakat Korea Utara ini menimbulkan beberapa perdebatan dalam penggunaan istilahnya. Masyarakat Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan mulanya hanya disebut sebagai *border-crosser*. Fenomena perpindahan yang mulanya disebut *border-crossing* di Semenanjung Korea ini telah memiliki

beberapa perubahan istilah atau definisi secara kondisional.

Oleh Byung-Ho Chung dalam tulisannya menyatakan bahwa istilah pengungsi telah secara umum digunakan oleh media internasional dalam konteks hak asasi manusia internasional (Chung B.-H. , 2014). Hal ini merujuk pada realita dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Korea Utara dalam memperoleh perlindungan dan status pengungsi sebelum mencapai Korea Selatan. Di Korea Selatan orang berasal dari Korea Utara terkadang diangap sebagai pembelot, pengungsi, dan ataupun migran (Bidet, 2009). Jika merujuk pada kondisi kemanusiaannya orang Korea Utara di Korea Selatan sering kali menjadi objek kekhawatiran, kewaspadaan, ataupun rasa belas kasihan sebagai korban kekejaman rezim negaranya.

Beberapa istilah atau sebutan bagi masyarakat Korea Utara dijelaskan oleh Byung-Ho Cho dalam tulisannya mengkategorikan ke dalam 4 jenis berdasarkan pada perspektif yang berbeda; (I) *political defectors*, sebutan ini melihat dari kondisi politik dan dan hak asasi manusia di Korea Utara dan Cina berdasarkan pada kajian politik dan hukum internasional, (II) *refugee migrants*, istilah ini melihat kesulitan adaptasi sosial dan integrasi kultural masyarakat Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan, (III) *Korean Diaspora*, pada kajian ini sebutan diaspora dilihat dari peristiwa atau fenomena migrasi dengan meyeberang wilayah batas negara yang merupakan proses dari *nation-building* yaitu sebagai agen yang melakukan dan menuntut perubahan secara mengakar diluar wilayah Korea Utara, dan (IV) *cultural minorities* merupakan pandangan yang melihat kondisi perbedaan kultur antara masyarakat Korea Utara dan Korea Selatan (Chung B.-H. , 2008).

Dalam penelitian ini penulis akan merujuk pada penggunaan istilah *'political defector'* atau pembelot untuk masyarakat Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Korea Utara secara internal dan eksternal untuk menyeberang ke Korea Selatan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un beradasarkan pada kondisi politik dan hak asasi masyarakat Korea Utara yang memutuskan untuk menyeberang atau membelot.

Fenomena *border-crossing* atau perpindahan yang dilakukan masyarakat Korea Utara sejak saat itu disebabkan oleh dua peristiwa besar. Gelombang perpindahan warga Korea dari Utara ke Selatan telah terjadi sejak akhir Perang Dunia II khususnya ketika masa Perang Korea menyebabkan sebanyak 2 juta penduduk melakukan migrasi dari Utara ke Selatan maupun Amerika Serikat.

Sejak Perang Dunia II Uni Soviet telah menduduki wilayah Utara dan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memiliki pos – pos militer di wilayah Selatan. Oleh karena dorongan atas dua kekuatan besar ini, perang berlanjut hingga memberikan dampak buruk bagi masyarakat seperti penggusuran dan perpindahan warga Semenanjung Korea pada saat itu. Pada tahun 1950 – 1953 terjadi perang antara Korea Utara *(Democratic People's Republic of Korea)* dan Korea Selatan *(Republic of Korea)*. Perang yang ditunggangi oleh kepercayaan dan ideologi tersebut menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi politik dan sosial kedua negara. Perang Korea merupakan lanjutan dari invasi kekuatan sekutu setelah Perang Dunia II (Chang, Heggard, & Noland, 2008).

Setelah itu pada tahun 1995 - 1998 Korea Utara dilanda bencana alam yaitu kemarau panjang hingga menyebabkan kekeringan panjang. Bencana kemarau panjang yang melanda Korea Utara pada waktu itu memberikan dampak buruk secara berkepenjangan seperti kegagalan pertanian dan kelaparan akut. Kegagalan sistem produksi ini disebabkan oleh keadaan agrikultur yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam disebabkan oleh kekeringan panjang. Disaat yang sama Korea Utara mulai memasuki masa krisis ekonomi diakibatkan oleh kurangnya sumber ekonomi negara dan mengurangnya pemasokan bantuan dari Soviet dan Cina saat itu (Millet, 2019).

Krisis yang dibarengi dengan kekeringan dan kelaparan secara besar-besaran di Korea Utara ini disebut *Great Famine*, krisis ini menyebabkan kematian sebagian masyarakat Korea Utara hingga mencapai 3 juta jiwa (Kim S. H., 2012). Mulai dari jumlah produksi pertanian yang berkurang, penjualan hasil tani yang semakin menurun, dan terlebih situasi ekonomi negara yang tidak stabil. Masyarakat Korea Utara secara tidak langsung berinisiatif untuk mencari alternatif untuk bertahan hidup.

Peristiwa tersebut menyebabkan banyak warga Korea Utara yang melintasi perbatasan Cina untuk mencari pasokan makanan dengan kondisi pengawasan perbatasan yang tidak begitu ketat, sebanyak 140,000 hingga 200,000 orang Korea Utara telah berada di Cina pada saat itu (Chung B.-H. , 2014). Hal ini menjadi pemicu munculnya perpindahan atau kegiatan *border-crossing* oleh masyarakat Korea Utara secara signifikan. Peningkatan jumlah pembelotan terjadi secara drastis ke Korea Selatan. Kenaikan secara signifikan mulai dari 50 – 63 orang sebelum 1990-an menjadi 488 orang pada kisaran tahun 1995 sampai memasuki tahun 2000-an

terutama pada saat terjadinya *Great Famine* yang melanda Korea Utara mencapai angka ribuan (Choi, 2018).

Menurut pendataan pada *Ministry of Unification*, Park Byeong-Seung melihat bahwa skala kedatangan pembelot hingga tahun 2011 mencapai angka 2,400-an pembelot yang kemudian menurun 45% - 50% dalam kurun waktu 9 tahun terakhir yaitu dengan kedatangan sebanyak 1,127 pembelot tahun 2017 dan 1,137 pembelot pada tahun 2018 (Byeong-Seung, 2018).

Berdasarkan pada laporan beberapa organisasi kemanusiaan seperti *Liberty to North Korea (LiNK)* atau *Life Funds for North Korean Refugees*, menyatakan jumlah keseluruhan masyarakat Korea Utara yang telah melakukan penyeberangan sejak berakhirnya Perang Korea hingga saat ini hampir mencapai 300,000 orang (Team L. , 2019). Korea Selatan hingga kini memiliki jumlah pembelot terbesar sebanyak 32,477 per tahun 2018 dan terakhir sebanyak 229 orang per Maret 2019 (MOU, 2019) .

Adanya penurunan jumlah angka pembelotan ke Korea Selatan secara perlahan terjadi sejak awal pemerintahan Kim Jong Un. Fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara terus terjadi secara konsisten. Adanya perkembangan – perkembangan karakter dan akses – akses masyarakat dengan wilayah luar Korea Utara memungkinkan sebab adanya konsistensi angka pembelotan sejak tahun 2011 yang terus ada. Kedatangan pembelot Korea Utara secara regular dalam 9 tahun terakhir menjadikan jumlah pembelot secara keseluruhan menjadi bertambah.

Gambar 1. 1 Grafik Kedatangan Pembelot Korea Utara di Korea Selatan

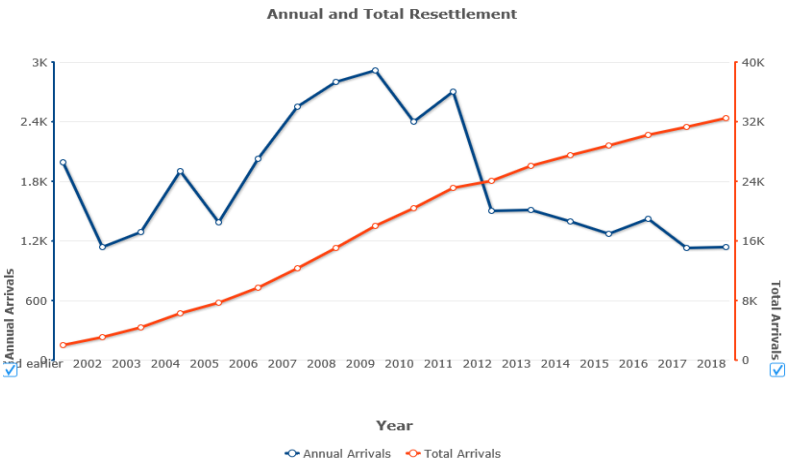

Pada tahun 2011 angka kedatangan pembelot Korea Utara menurun 50% dari kedatangan setiap tahun sebelumnya, *Ministry of Unification* Korea Selatan mencatat jumlah angka yang menurun tersebut namun tetap konsisten kedatangannya hingga Maret tahun 2019. Pada saat Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan negara dan partai, ia secara langsung meningkatkan pengamanan terhadap wilayah perbatasan dan sistem kontrol sosial. Kontrol sosial dan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin ketat menjadikan penyeberangan bagi warga Korea Utara yang ingin membelot lebih sulit.

Komposisi pembelot Korea Utara pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an hanya didominasi oleh masyarakat yang memiliki jabatan penting atau tinggi *(high-level defector)*. Pembelot Korea Utara tiba dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda seperti mantan diplomat, pengusaha, pejabat pemerintah, dan tentara. Namun seiring dengan terjadinya perubahan situasi politik dan kondisi ekonomi internal Korea Utara, komposisi pembelot Korea Utara mengalami peningkatan variasi latar belakang khususnya dibawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Ministry of Unification mendata berbagai macam okupasi atau latar belakang seperti sekelompok pekerja buruh, petani, ibu rumah tangga, prajurit tingkat rendah, dan pelajar yang kekurangan kapasitas dalam kegiatan perekonomian maupun pendidikan (Choi, 2018). Selain itu juga sebagian besar dari komposisi tersebut merupakan mantan pejabat, pelajar, wanita dan masyarakat biasa yang mengikuti keluarganya.

Latar belakang yang bervariasi tidak hanya digambarkan dari komposisi pembelot Korea Utara yang bermacam – macam. Namun hal itu juga terjadi disebabkan oleh umur rata – rata para pembelot. Rata – rata usia pembelot Korea Utara yang tiba di Korea Selatan 20 – 39 tahun dengan jumlah mencapai 18.000 sekian, dengan rincian jumlah laki – laki 4.668 orang dan permpuan 14.094 orang (MOU, 2019). Selain dari itu sejumlah pembelot dengan umur lanjut usia dengan jumlah hampir 9.000 orang.

Dengan jumlah tersebut terlihat bahwa umur produktif lebih mendominasi daripada umur lanjut usia. Hal ini menjadikan pembelot Korea Utara pada umur produktif mendominasi dan memiliki karakter yang

berbeda dengan generasi orangtua mereka. Perbedaan tersebut terlihat dari karakter dan cara berpikir masing – masing kelompok usia. Perbedaan tersebut mempengaruhi proses pembelotan dari mulai keputusan untuk membelot, persiapan pembelotan hingga proses yang dilalui hingga mencapai negara tujuan yang berbeda.

Perbedaan ini terjadi karena usia produktif yang lahir pada 1980-an hingga masa *Great Famine* tidak merasakan peristiwa pada masa perang. Keadaan stabilitas kekuasaan pemerintah dan secara tidak langsung menyaksikan perjuangan *Great Leader* Kim Il Sung ketika memperjuangkan tanah bangsanya. Generasi ini lahir ketika Korea Utara dilanda masa krisis dan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak terhadap adaptasi dan pemikiran generasi tersebut terhadap stabilitas dan kapabilitas rezim.

Sejumlah negara yang menjadi tujuan utama pembelotan masyarakat Korea Utara merupakan Cina dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut terletak berdekatan secara geografis. Namun untuk dapat mencapai kedua negara tersebut membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan berat. Korea Selatan sebagai negara yang bersaudara dengan Korea Utara menjadi tujuan utama pembelotan masyarakat Korea Utara.

Peran penting Korea Selatan dalam membantu para pengungsi Korea Utara secara domestik juga terlihat ketika meloloskan dan merevisi kembali Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara (*North Korean Human Rights Act)* pada tahun 2016 melalui *National Assembly* dibawah kepemimpinan Park Geun Hye (Choi, 2018). Kemudian institusionalisasi isu hak asasi manusia Korea Utara juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan

bekerjasama dengan pihak internasional juga merupakan kontribusi yang sangat berpengaruh dalam mendukung gerakan dan inisiatif untuk membela keadaan hak asasi para pembelot Korea Utara. Kontribusi pemerintah Korea Selatan terhadap masyarakat Korea Utara yang membelot diberikan secara moral maupun politis.

Di Korea Selatan para pembelot menjadi individu bebas yang tentunya menghadapi proses adaptasi yang sulit untuk kehidupan dan budaya yang baru. Para pembelot merasa belum terbiasa dengan kebebasan baru yang ditemukan. Modernitas Korea Selatan dan segala pilihan yang mereka miliki untuk menjalani kehidupan baru. Saat tiba dan menjalani proses berdaptasi di Korea Selatan, para pembelot Korea Utara mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Walaupun begitu pemerintah Korea Selatan meberika sejumlah bantuan dan pendampingan untuk membantu adaptasi pembelot Korea Utara di Korea Selatan.

Perjalanan yang ditempuh hingga mencapai Selatan tidak secara instan memberikan kenyamanan bahkan kesejahteraan bagi para migran Korea Utara, karena Korea Selatan merupakan perkumpulan komunitas masyarakat yang sangat berbeda (Ji Seong Ho, 2016). Keterbatasan transisi dari sumber daya manusia yang diperoleh di Korea Utara dan persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap pembelot Korea Utara menyebabkan kesulitan dalam proses adaptasi kehidupan di Korea Selatan (Yoon I.-J. , 2001).

Hal itu terlihat ketika para pengungsi Korea Utara tiba di Selatan mereka harus benar-benar dapat memahami bagaimana kebiasaan masyarakat di Korea Selatan, bahkan harus mulai mempelajari banyak sesuatu yang baru dari awal yang belum pernah diketahui

sebelumnya agar supaya mereka dapat mencocokkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Walaupun begitu, Korea Selatan masih tetap menjadi tujuan utama bagi para pembelot untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman sebagai individu dengan hak-hak dan kebebasannya.

Berdasarkan pada *2016 Unification Attitude Survey of North Korean Refugees* menyatakan bahwa 76.1% menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan kehidupan Korea Selatan (Sangat puas: 49.3% + puas 26.8%) (Choi, 2018). Sementara survei daripada *The Korea Hana Foundation* (KHF) juga mengindikasikan 67% persen dari responden yang puas dengan kehidupan di Korea Selatan, menunjukkan kemampuan perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu masa transisi pembelot Korea Utara di Korea Selatan (Choi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pembelot Korea Utara masih bisa melakukan adaptasi hingga menjalani kehidupan selayaknya warga negara di Korea Selatan.

Pemerintah Korea Utara memberikan pelayanan secara khusus bagi para pembelot Korea Utara. Sementara kelompok pengungsi Korea etnis lain seperti Cina Korea dan Asia Tengah dari etnis Korea tidak mendapatkan penyediaan dan fasilitas seperti yang pembelot Korea Utara dapatkan. Para pembelot Korea Utara memperoleh hak kewarganegaraan langsung saat kedatangan dan menerima dana untuk pemukiman, sewaan apartemen secara permanen, dan bentuk dukungan lainnya (Chung B.-H. , 2014).

Survey oleh *Korea Hana Foundation* (KHF) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembelot Korea Utara di Korea selatan mengalami kesulitan ekonomi, persepsi

negatif, dan diskriminasi sosial oleh masyarakat Korea Selatan. Menurut Andrei Lankov, dalam bukunya menyatakan sebuah proses transisi tidaklah selalu lancar dan mudah (Choi, 2018). Walaupun kedua Korea memiliki karakter budaya dan bahasa yang sama, namun setelah adanya pembagian dua wilayah Utara dan Selatan menjadi dua sistem yang berbeda bukan berarti mudah bagi para migran Korea Utara untuk secara instan mampu beradaptasi dengan modernisasi yang telah terjadi di Korea Selatan.

Walaupun begitu jumlah pembelot yang meninggalkan Korea Utara terus terjadi hingga awal tahun 2019. Perjuangan pembelotan yang memakan waktu lama dan proses menyeberangi perbatasan dengan tingkatan pengawasan yang semakin ketat dibawah kepemimpinan Kim Jong- Un membuatnya sangat berisiko (CSIS, 2018).

Perkembangan dinamika dunia internasional secara politik dan ekonomi tentu juga mempengaruhi faktor yang dialami oleh masyarakat Korea Utara yang hendak merencanakan pembelotan (Choi, 2018). Dengan situasi dan karakter pembelot yang berbeda dari masa sebelumnya tepatnya sebelum Kim Jong Un memimpin, maka berbeda pula alasan dan faktor pembelotan.Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi dan merespon fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara ini masih terus mengkaji kebijakan - kebijakan terhadap pengungsi Korea Utara khususnya mengenai faktor struktural maupun moral yang membentuk dan melatarbelakangi dinamika dan penyebab terjadinya fenomena pembelotan tersebut. Atas alasan tersebut penting bagi penulis untuk mengeksplorasi dan menganalisa faktor pemicu penyebab masih terjadinya pembelotan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis berusaha mengulas faktor-faktor yang mendorong dan menarik masyarakat Korea Utara untuk melakukan pembelotan ke Korea Selatan di bawah masa kepemimpinan Kim Jong Un.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang sebelumnya dalam penelitan yang berjudul "Pembelotan Masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan di bawah masa Kepemimpinan Kim Jong Un tahun 2011 - 2018," maka munculah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

"Apa faktor yang menyebabkan terjadi pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan di bawah masa Kepemimpinan Kim Jong Un tahun 2011 – 2018"

C. Kerangka Pemikiran

1. Push –Pull Factors

Push-pull Factors ini merupakan sebuah teori dalam studi migrasi yang pertama kali di deskripsikan oleh Ernst Ravenstein tahun 1876 dalam penelitiannya *"Laws of Migration"*. Setelah itu beberapa peneliti telah memodifikasi dan mengembangkan teori ini yang mana dalam kasus pembelotan masyarakat Korea Utara ini penulis akan menggunakan model *Push and Pull Factors* dengan tujuan menganalisa faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi seorang individu atau komunitas masyarakat sebagai berikut (Lee, 1966):

- Faktor-faktor yang terkait dengan daerah asal
- Faktor –faktor yang terkait dengan daerah tujuan

- Adanya pengaruh hambatan dan tantangan
- Faktor individual

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh migran di wilayah lingkungan yang baru seperti asimilasi atau upaya transisi dengan sistem dan kebiasaan yang baru ternyata berbanding terbalik namun perbandingan faktor positif dan negatif yang nantinya akan menjadi pertimbangan lebih jauh bagi para migran untuk migrasi (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016).

1.1. Push Factor

Gambar 1. 2 Model *Push Factor*

Push Factor ditentukan oleh beberapa alasan yang timbul dan terjadi di daerah asal para migran (Lee, 1966). Beberapa faktor seperti perang, revolusi politik dan konflik kekerasan yang mendorong orang untuk melarikan diri dari penganiayaan politik atau kebebasan beragama yang termasuk dalam alasan politik. Alasan lingkungan berupa bencana alam yang menghancurkan

wilayahnya termasuk krisis kelaparan yang membuat individu atau masyarakatnya terdorong untuk mencari keselamatan di lingkungan yang lebih stabil, selain itu juga alasan sosial yang berupa kualitas ekonomi yang kurang yang mendorong individu atau masyrakat untuk mencari capaian standar kehidupan yang lebih baik dan mencari peluang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Kemiskinan *(Poverty)* merupakan hal utama yang mendorong suatu komunitas masyarakat untuk berpindah dari negaranya (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016). Kemiskinan membawa suatu msyarakat kepada situasi ekonomi yang mengancam keberlangsungan kehidupannya. Oleh karena alasan tersebut mencari wilayah lain untuk bertahan hidup merupakan alternatif.

Ketakutan *(Fear)* merupakan salah satu yang mendorong suatu komunitas masyarakat untuk pergi dari negaranya. Ketakutan yang timbul di negaranya dapat berupa ketakutan akan cara kepemimpinan suatu rezim, ketakutan terhadap sanksi hukum yang diterapkan oleh rezim atau pemerintah, dan ketakutan terhadap ancaman – ancaman politik dalam suatu rezim atau pemerintahan (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016).

Bencana alam *(Disasters)* merupakan faktor tak terduga yang terjadi

dalam suatu negara. Dengan adanya faktor ini menimbulkan sejumlah kerusakan ataupun kehilangan yang memaksa warga masyarakat suatu negara untuk pidah wilayah yang lebih aman dan nyaman (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016). Di Korea Utara bencana alam seperti kekeringan yang berkepanjangan *(Great Famine)* terjadi dalam waktu yang lama hingga menyebabkan angka kematian yang tinggi. Kekeringan yang menyebabkan kelaparan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Korea Utara pada saat itu.

Tingkat pengangguran *(unemployment)* adalah faktor yang mendorong masyarakat untuk berpindah dari segi ekonomi. Situasi sumber daya manusia yang tidak berkembang hingga mendorong masyarakat untuk pindah ke wilayah lain.

Fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara ini adalah dampak buruk dari adanya perubahan geopolitik di era pasca Perang Dingin. Perang yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat Korea Utara mengharuskan mereka untuk pindah ke wilayah lain. Penurunan yang drastis dalam dukungan Soviet dan Cina hingga awal 1990-an mengakibatkan penurunan sistem ekonomi hingga mempersulit situasi ekonomi di Korea Utara.

Selain perang dan krisis ekonomi, kemunculan pasar ilegal atau disebut dengan *Bottom Up Marketization* setelah masa krisis juga menjadi suatu dorongan. Pasar menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat Korea Utara sekaligus sumber ketahanan selama di Korea Utara, begitu pula dengan pola pikir pasar laba dan untung yang mendorong pembelotan masyarakat Korea Utara (LiNK, 2018).

Faktor selanjutnya merupakan mengakarnya kegiatan suap dan korupsi disebabkan oleh kemunculan kegiatan ekonomi baru secara ilegal. Selain itu juga pembatasan dan tindakan keras yang mendorong kegiatan pasar menjadi sumber utama ketahanan hidup, sosial maupun ekonomi masyarakat Korea Utara.

Selain itu faktor-faktor seperti meningkatnya tuntutan untuk bertahan hidup dengan terlibat dalam kegiatan pasar secara ilegal di perbatasan, meningkatnya jumlah kaum elit yang mampu mengakses dunia luar sedikit lebih mudah, dan meningkatnya arus perjalanan atau perpindahan sejak masa perang (LiNK, 2018).

Dalam penulisannya, penulis mengklasifikasikan faktor politik dan ekonomi. Pengkalsifikasian ini ditujukan agar mengetahui dengan jelas faktor – faktor pembelotan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un. Sejumlah fenomena terbaru terjadi di masa

kepemimpinan Kim Jong Un yang melatarbelakangi kegiatan pembelotan selama 8- 10 tahun terakhir.

1.2. Pull Factors

Pull Factors merupakan alasan yang mempengaruhi individu atau sekelompok masyarakat dengan ketertarikannya untuk menuju suatu wilayah atau negara tujuan (Wickramasinghe & Wimalaratana, Fall 2016). Sejumlah faktor – faktor yang menarik suatu komunitas masyarakat untuk melakukan pembelotan berasal dari negara yang dituju.

Gambar 1. 3 Model *Pull Factors*

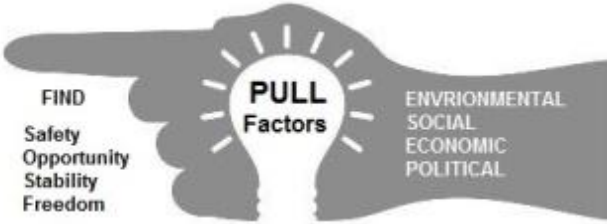

Beberapa faktor mempengaruhi ketertarikan individu atau sekelompok masyarakat untuk pergi ke suatu wilayah atau negara tujuan seperti faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga faktor politik (Ramos, 2017).

Keamanan *(Safety)* merupakan keadaan yang utamanya dicari oleh

pembelot. Situasi dalam negri terkadang tidak berpihak terhadap masyarakat bahkan hingga timbul ancaman – ancaman berbahaya. Selain karena itu keemana yang dicari juga karena situasi negara yang sedang dalam keadaan konflik atau perang.

Peluang *(Opportunity)* merupakan faktor tarikan lainnya yang menyebabkan adanya pembelotan (Ramos, 2017). Hal ini terjadi karena situasi ekonomi maupun politik dalam negri yang tidak memihak pada rakyat.

Kebebasan *(Freedom)* merupakan faktor yang sangat penting yang menarik suatu komunitas masyarakat untuk pindah ke wilayah lain. Kebebasan yang tidak didapatkan sepenuhnya di negara asal sehingga mengekang hak – hak dasar warga negara (Ramos, 2017).

Dalam kasus pembelotan masyarakat Korea Utara yang melarikan diri dari wilayah asal untuk mencari keamanan pribadi, kebebasan sebagai individu, peluang dalam memperoleh pekerjaan, mobilitas, pendidikan, dan stabilitas di negara tujuan yang merupakan Korea Selatan

Dalam kasus pembelotan masyarakat Korea Utara, Korea Selatan sebagai negara tujuan utama masyarakat Korea Utara untuk membelot memberikan bantuan melalui *Resettlement Program* serta perlindungan

bagi masyarakat Korea Utara di Selatan (Choi, 2018).

Korea Selatan memiliki beberapa alasan yang menarik pembelot Korea Utara untuk pergi ke Korea Selatan (Choi, 2018), beberapa diantaranya merupakan keberadaan infrastruktur yang menghasilkan fasilitas dan pelayanan yang lebih memadai, akses kesehatan dan medis yang lebih mudah, stabilitas demokrasi, kesempatan pekerjaan dan pendidikan, dan tentunya akses terhadap budaya dan hiburan yang lebih terbuka dan bebas (Ramos, 2017).

Berdasarkan pada grafik yang dibuat oleh Lee dalam penelitiannya pada tahun 1966 mendeskripsikan penyebab migrasi, faktor - faktor lingkungan, sosial, ekonomi dan politik yang menarik individu atau masyarakat *(pull)* seperti keamanan dan perlindungan, peluang, stabilitas, dan kebebasan yang akan diperoleh ketika pergi ke suatu tujuan di luar wilayah asalnya. Faktor - faktor pendorong individu atau masyarakat *(push)* seperti kemiskinan, bencana alam, pengangguran, dan ketakutan terhadap rezim yang mengharuskan mereka mencari tempat baru atau wilayah yang lebih aman dan tepat. (Lee, 1966)

Kehidupan sehari - hari masyarakat Korea Utara merupakan perjuangan menghindari hukum rezim dan bertahan hidup dari serba kekurangan selama beberapa dekade (Chang, Heggard, & Noland, 2008). Pertimbangan para pembelot untuk meninggalkan Korea Utara disebabkan oleh berbagai alasan dan faktor pendorong yang berkaitan situasi politik dan ekonomi Korea Utara khusunya pada masa kepemipinan Kim Jong Un.

D. Hiptosesis

Pada kasus pembelotan masyarakat Korea Utara, terjadinya pembelotan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un disebabkan oleh:

1. Faktor dorongan (*Push Factor)* yang di klasifikasikan kedalam faktor politik dan ekonomi berupa ketakutan terhadap rezim, peningkatan kegiatan suap dan korupsi, perkembangan kegiatan pasar ilegal, dan muncul dan berkembangnya generasi *Jangmadang* yang disertai dengan meningkatnya kegiatan pasar yang menuntut para pebisnis swasta maupun masyarakat biasa secara ilegal menjalani hubungan dengan dunia luar hingga melakukan berujung pada pembelotan.
2. Faktor tarikan *(Pull Factors)* yang juga mempengaruhi keputusan pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan yaitu berupa masuknya aliran informasi dari dunia luar serta informasi mengenai penyediaan dukungan dan perlindungan oleh pemerintah Korea Selatan termasuk peluang pekerjaan dan pendidikan, hak dan kebebasan individu yang didapatkan di Korea Selatan, dan *Outflow of people* dimana adanya koneksi yang terus terjadi antara pembelot dan masyarakat Korea Utara.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyebab munculnya gelombang perpindahan masyarakat Korea

Utara dalam melakukan pembelotan ke Korea Selatan.

2. Mengetahui motivasi-motivasi perpindahan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan
3. Mengetahui urgensi permasalahan dan tantangan serta kondisi migran setelah keluar dari Korea Utara di Korea Selatan.
4. Mengetahui faktor-faktor yang yang mendorong dan menarik masyarakat Korea Utara untuk membelot ke Korea Selatan.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini hanya fokus pada rangkaian perpindahan atau migrasi masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan yang terjadi sejak masa Perang Korea. Namun secara khusus akan membehas fenomenan pembelotan masyarakat Korea Utara pada masa kepemimpinan Kim Jong Un dari tahun 2011 hingga 2018. Penjelasan sejarah awal munculnya gelombang pengungsi Korea Utara hingga tantangan yang dihadapi oleh para migran Korea Utara ketika tiba di Korea Selatan juga akan menjadi bahasan dalam penulisan karya tulis ini. Selain itu segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan terhadap para pengungsi Korea Utara di Korea Selatan juga merupakan objek penelitian selama masih ada kesinambungan dalam pembahasan.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini merupakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan variable-variabel penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini diperoleh dari sumber-sumber informasi seperti buku, jurnal artikel, laporan berita, *website* pemerintah Korea Utara dan Korea Selatan dan *website* resmi organisasi bagi pengungsi Korea Utara yaitu

Liberty in North Korea, juga beberapa institusi peneliti dari CSIS *(Centre for Strategic and International Studies), Human Rights Watch* dan beberapa lainnya untuk mendapatkan data-data mengenai pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan karya tulis ini ke dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran atau landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian serta kerangka penulisan

Bab II menjabarkan kebijakan kondisi politik Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un, serta fasilitas pembelot Korea Utara di Korea Selatan sebagai negara tujuan utama pembelotan yang menjadi faktor terjadinya pembelotan.

Bab III menjabarkan kebijakan dan kondisi ekonomi masyarakat Korea Utara di bawah masa kepemimpinan Kim Jong Un serta situasi ekonomi pembelot Korea Utara di Korea Selatan yang menjadi faktor terjadinya pembelotan.

Bab IV merupakan kesimpulan yang menutup penulisan karya tulis ini dengan pembahasan berupa rangkuman dari bab - bab sebelumnya